



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 194/Sid.Pend/PHPU.BUP/PAN.MK/01/2025  
Lampiran : 1 eksemplar  
Hal : Panggilan Sidang

09 Januari 2025

**Yth. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten KEPULAUAN TANIMBAR**

sebagai Pemberi Keterangan

Jl. Ir. Soekarno, Sifnana, Tanimbar Sel., Kab. Kepulauan Tanimbar, Maluku

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi, atas perintah Hakim Konstitusi dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), dengan ini menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama dalam perkara yang diajukan:

Adolof Bormasa dan Henrikus Serin, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KEPULAUAN TANIMBAR  
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KEPULAUAN TANIMBAR

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan registrasi perkara Nomor 243/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada hari Jum`at tanggal 03 Januari 2025 pukul 14:00 WIB, agar menghadiri Sidang Panel Mahkamah Konstitusi yang akan diselenggarakan pada:

hari : Selasa  
tanggal : 14 Januari 2025  
waktu : Pukul 08:00 WIB  
tempat : Ruang Sidang Gd. MKRI 1  
Lantai 2  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta  
acara : **Pemeriksaan Pendahuluan**

Mengingat keterbatasan tempat dalam persidangan, Para Pihak dapat hadir secara luring atau daring (*hybrid*). Dalam hal Para Pihak akan hadir secara luring, masing-masing pihak hanya dapat diwakili oleh maksimal 2 (dua) orang kuasa hukum atau prinsipal dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan ke Mahkamah melalui email [jurpang1@mkri.id](mailto:jurpang1@mkri.id) atau whatsapp nomor 081119516666 paling lambat 1 (satu) hari sebelum persidangan.

Demikian salinan Permohonan ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera  
Wiryanto**

Tembusan:

Yth. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

*Catatan: Para Pihak wajib hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi 60 (enam puluh) menit sebelum persidangan dimulai.*

